# BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1 Hubungan Internasional

Istilah hubungan internasional memiliki banyak definisi, dan sampai saat ini belum ada yang baku. Namun demikian secara umum dapat didefiniskan bahwa hubungan internasional berkonsentrasi terhadap hubungan yang terjadi antar pemerintah di dunia Sistem Internasional merupakan fokus perhatian yang esensial dalam studi Hubungan Internasional.

Studi hubungan Internasional itu sendiri merupakan studi mengenai sistem independen yang berinteraksi dengan frekuensi tinggi sesuai dengan proses-proses yang teratur (Holsti, 1987: 29). Interaksi-interaksi tersebut melibatkan fenomena sosial yang melintasi batas nasional suatu negara, baik menyangkut aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan. Hal ini menimbulkan kompleksitas dari kenyataan yang terjadi, serta memunculkan masalah yang menarik untuk dicari penyelesaiannya.

Tujuan utama dari studi Hubungan Internasional adalah untuk mempelajari perilaku-perilaku internasional, yaitu perilaku para aktor negara maupun non negara di dalam arena transaksi internasional. Hubungan tersebut tidak hanya berupa kontak fisik maupun temu muka secara langsung, tetapi juga berupa transaksi ekonomi, penggunaan kekuatan militer dan diplomasi baik secara umum maupun khusus, sehingga dalam perkembangannya mengarah pada kegiatan-kegiatan seperti, perang, konflik, kerjasama, pembentukan aliansi, interaksi dalam

organisasi internasional bantuan kemanusiaan, perdagangan internasional, investasi, dan sebagainya (Mas`oed, 1994: 28).

Hubungan tersebut melibatkan aktivitas sosial manusia suatu negara dan mempengaruhi negara lain yang berkaitan erat dengan segala bentuk interaksi di antara masyarakat negara-negara, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun warga negara, yang meliputi politik luar negeri atau politik internasional, Palang Merah Internasional, pariwisata, perdagangan internasional, transportasi, komunikasi, dan perkembangan nilai-nilai dan etika hubungan Internasional (Holsti, 1992: 26). Hal ini berarti bahwa hubungan internasional mencakup interaksi yang dilakukan oleh semua anggota masyarakat internasional, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam segenap kehidupan manusia.

Dalam mengkaji hubungan internasional, yang muncul dalam pemikiran umumnya adalah tentang hubungan antara negara dengan negara. Hal ini dikarenakan pada kenyataannya bahwa negara yang membuat keputusan vital yang mempengaruhi perang dan damai dan pemerintahlah yang memiliki otoritas untuk mengatur ide-ide politik, yurisdiksi teritorial, kewarganegaraan, komunikasi, dan aspek-aspek lain dalam hubungan internasional (Johari,1985: 13) Hubungan Internsional pun mencakup analisis kebijakan luar negeri ataupun proses politik antar negara, walaupun dengan kepentingan-kepentingan diberbagai segi hubungan antar masyarakat yang berbeda. Semua bentuk interaksi ini bermuara kepada pemenuhan kepentingan yang ditentukan oleh negara sebagai alat untuk mencapai kepentingan politis atau militer (Holsti, 1992: 29).

Studi Hubungan Internasional sekalipun kajian pokoknya adalah hubungan antarnegara, namun sebenarnya cakupannya bisa lebih dari itu. Unit-unit analisisnya seperti organisasi-organisasi internasional, perusahaan-perusahaan multinasional (MNC), bahkan kelompok-kelompok teroris juga dapat dipandang sebagai aktor-aktor hubungan internasional karena merupakan bagian dari apa yang lebih tepat disebut sebagai *world politics*.

Hubungan Internasional berjalan dengan adanya kontak dan interaksi di antara negara-negara, seperti interaksi politik antarpemerintah, perang, aliansi hubungan diplomatik, perundingan dan ancaman akan kekuatan militer. Selain itu, ikatan atau hubungan ekonomi, budaya, agama, ras, etnik, serta hubungan antara orang-orang yang hidup secara terpisah pada negara-negara yang terorganisir dapat pula masuk sebagai lingkup kajian hubungan internasional (Toma dan Gorman, 1991: 12).

Interaksi dalam hubungan internasional dilakukan oleh faktor-faktor yang dapat memilih tujuan, memobilisasi saran untuk mencapai tujuan dan implementasi (aplikasi dan teknik). Secara umum ada beberapa tipe aktor, yaitu organisasi internasional, dan negara.

Konsep interaksi mengandung arti saling mempengaruhi, bercirikan adanya dua atau lebih unit yang berhubungan, cara bertindak atau kondisi-kondisi beberapa unit yang dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh unit lain yang dapat melakukan aksi untuk mencapai suatu tujuan (Couloumbis dan Wolfe, 1986: 30). Jadi, dapat disimpulkan bahwa studi Hubungan Internasional pada dasarnya mempelajari interaksi yang melewati batas-batas negara yang dilakukan oleh aktor

negara, maupun non-negara yang juga melibatkan berbagai sektor kehidupan di dalamnya, seperti ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya.

### 2.1.1 Diplomasi

Diplomasi didfinisikan oleh Hans J. Morgenthou dalam buku *Politik Antar Bangsa* "Diplomasi adalah bentuk-bentuk dan cara-cara untuk mencapai tujuan serta memperoleh hasil yang diharapkan dalam hubungan internasional dengan menggunakan kecerdasan dan kelincahan berkenaan dengan pelaksanaan hubungan resmi pemerintah dari negara-negara berdaulat" .(Morgenthou:1991:153).

Secara singkat bahwa diplomasi adalah cara halus dan sopan yang digunakan oleh masing-masing negara dalam ranka pencapaian kepentingan nasional dalam hubungan dengan negara-negara lain. Diplomasi mencakup penggunaan dan pemanfaatan pengaruh serta kapabilitas suatu negara dengan menggunakan cara-cara damai umumnya melalui perundangan untuk menghasilkan kesepakatan dengan negara lain dan mendapatkan kesediaan guna melakukan hal-hal yang diharapkan. Demikian pula sebaliknya, dapat digunakan untuk menghasilkan kesepakatan agar tidak melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki dan tidak diharapkan.

Diplomasi merupakan manajemen dalam penyelenggara hubungan luar negeri. Seni dan profesionalisme untuk menghasilkan konsensus serta menghindari munculnya konflik kepentingan ke permukaan dalam rangka hubungan luar negeri dalam sistem internasional. Keberhasilan diplomasi adalah

dinilai dari kemampuan untuk mencapai hasil sebesar ungkin dari pengorbanan yang sekecil mungkin (Rudy, 1992:57-58)

Diplomasi sangat diidentikkan dengan tawar menawar dan negosiasi. Selain sebagai instrumen kebijakan yang sesuai untuk menghasilkan solusi yang dapat menimbulkan bahaya. Seperti negosiasi yang juga merupakan potensi untuk membuat permusuhan menjadi buruk, memperkuat agresi, Diplomasi untuk mempersiapkan cara penyerangan dan mengkikis moral dan dasar hukum perdamaian. Hal ini dikarenakan negosiasi dapat pula digantikan untuk mengulur waktu, dan membuat propaganda.

Tugas diplomasi dapat dibagi menjadi :

a. Diplomasi harus menetapkan tujuannya dengan memandang kekuatan yang benar-benar tersedia dan potensial dari pengejaran tujuan.
b. Diplomasi harus menilai tujuan bangsa-bangsa lain dengan memandang kekuatan yang benar-benar tersedia dan potensial
c. Diplomasi harus menetapkan seberapa jauh tujuan yang berbeda-beda ini dapat diintegrasikan menjadi satu
d. Diplomasi harus menggunakan cara yang sesuai dengan pengejaran tujuannya. Kegagalan dalam salah satu dari semua tugas tersebut dapat membahayakan keberhasilan suatu politik luar negeri, dan bersamaan dengan perdamaian dunia.

## 2.2 Kerjasama Internasional

Dalam hubungan internasional dikenal apa yang dinamakan kerjasama internasional, yaitu bertemunya bermacam-macam kepentingan nasional dari berbagai macam negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi didalam negerinya sendiri (Kartasasmita, 1987:42). Kerjasama internasional adalah sisi lain dari konflik yang juga merupakan aspek dalam hubungan internasional. Kerjasama internasional dapat berbentuk dari komitmen sebagian individu untuk mencapai kesejahteraan secara kolektif atau sebagai hasil dari adanya persamaan kepentingan. Isu utama dari teori kerjasama internasional berdasarkan pada kepentingan sendiri, sejuah mana keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerjasama dapat mendukung konsepsi dari kepentingan tindakan yang unilateral dan kompetisi (Dougherty dan Pfaltgraff, 1997:419).

Kerjasama dapat berlangsung dalam berbagai konteks yang berbeda. Kebanyakan hubungan dan interaksi yang berbentuk kerjasama terjadi langsung di antara dua pemerintah yang memiliki kepentingan atau menghadapi masalah serupa secara bersamaan. Bentuk kerjasama lainnya dilakukan antar negara yang bernaung dalam organisasi dan kelembagaan internasional (Holsti, 1992:650).

Lebih lanjut dikatakan bahwa sumber-sumber dari terbentuknya kerjasama antar negara adalah : 1. Alasan utama pemerintah melakukan kerjasama adalah untuk mengurangi beban (*reducing costs*); 2. Kerjasama mereka juga bekerjasama dengan tujuan meningkatkan efisiensi (*to increase efficiency*), yang sebaliknya juga bertujuan utnuk mengurangi beban; 3. Kerjasama juga berkembang karena adanya persamaan ancaman atau masalah (*common threats or problem*); 4.

Pemerintah juga melakukan kerjasama dengan tujuan untuk mengurangi beban negatif yang dapat ditimbulkan oleh tindakan individual mereka terhadap pihak lain (*to reduce the negative costs their individual actions may have on others*).(Holsti, 1992:362-363).

### 2.2.1 Kerjasama Regional

Sebenarnya kerjasama regional ini sama dengan kerjasama internasional karena terdiri dari dua negara atau lebih. Hanya saja kerjasama regional terbatas keaggotaannya, yaitu hanya bagi negara-negara di kawasan tertentu (Fawcett, 1995:9-10). Negara-negara di kawasan memiliki kepentingan yang sama, terutama untuk menjaga stabilitas kawasan agar stabilitas nasional mereka juga terjamin.

Dalam kerjasama regional yang kini marak terjadi di berbagai kawasan dunia, ada kecenderungan terbentuknya suatu regionalisme, yaitu suatu pengaturan bersama untuk melaksanakan kerjasama fungsional di bidang ekonomi. Namun demikian, dalam konteks regional inipun tak terhindarkan bila adanya konflik sisa-sisa Perang Dingin, seperti konflik ideologi di Asia Timur, konflik-konflik klaim wilayah dan perbatasan seperti marak di Asia Tenggara.

Kerjasama regional berarti meleburkan sebagian dari kedaulatan nasional untuk diintegrasikan dalam kerjasama fungsional, sehingga penting untuk menjaga saling kepercayaan di kawasan guna menghindarkan terjadinya konflik. (Holsti, 1992:310).

## 2.3 Politik Internasional

Hubungan Internasional identik dengan Politik Internasional dan Politik luar negeri, khususnya jika konteks negara-negara menjadi fokus utama yang membedakan ketiganya adalah peran aktor-aktor yang terlibat (faktor subjek pelaksananya dan faktor kepentingan baik secara ideologis, ekonomi, keamanan dan prestise).

Di dalam Politik Internasional terdapat elemen-elemen kerjasama dan konfrontasi, permintaan dan dukungan, gangguan dan pengaturan. Negara membuat perbedaan antara kawan dan lawan (Perwita & Yani, 2005:40). Politik Internasional memandang tindakan suatu negara sebagai respon atas tindakan negara lain. Dengan kata lain Politik Internasional adalah proses interaksi antara dua negara atau lebih.

Faktor-faktor utama dalam lingkungan internasional dapat diklasifikasikan dalam tiga hal pokok. Pertama, lingkungan fisik, seperti lokasi dan geografi, sumber daya alam dan tingkat teknologi suatu bangsa. Kedua, penyebaran sosial (*social clevage*) dan perilaku, yang di dalamnya mengandung pengertian sebagai hasil pemikiran manusia sehingga menghasilkan budaya politik serta munculnya kelompok-kelompok elit tertentu. Ketiga, timbulnya lembaga-lembaga politik dan ekonomi serta organisasi-organisasi internasional dan pranata-pranata ekonomi serta politik lainnya (Lentner, 1974: 58).

## 2.4 Politik Luar Negeri

Politik luar negeri berhubungan dengan semua usaha dari sistem politik internasional untuk beradaptasi dengan lingkungan geopolitiknya. Dan untuk menetapkan tindakan pengendalian terhadap lingkungannya agar dapat memenuhi nilai-nilai tujuan yang terdapat dalam sistemnya. Politik luar negeri adalah suatu bentuk perilaku adaprif yang dimiliki oleh suatu negara. Dengan demikian Politik luar negeri merupakan tindakan-tindakan autoritatif yang dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi aspek-aspek lingkungan internasional yang diinginkannya (Rudy, 1992:77).

Politik luar negeri merupakan serangkaian atau seperangkat kebijaksanaan dari suatu negara dalam interaksinya dengan negara lain dalam pergaulannya dengan masyarakat dunia yang kesemuanya didasarkan serta untuk memenuhi kepentigan nasional.

Kepentingan Nasional adalah tujuan fundamental dan faktor penentu akhir yang mengarahkan para pembuat keputusan dari suatu negara dalam merumuskan kebijakan luar negrinya. Kepentingan nasional suatu negara secara khas merupakan unsur-unsur yang membentuk kebutuhan negara yang paling vital, seperti pertahanan, keamanan, militer, dan kesejahteraan ekonomi.(Plano dan Olton.1999:11).

Tujuan Politik luar negeri dapat dikatakan sebagai citra mengenai keadaan dan kondisi di masa depan suatu negara dimana pemerintah melalui para perumus kebijaksanaan nasional mampu mempertahankan integritas nasionalnya (Perwita & Yani, 2005:49-51).

## 2.5 Keamanan

Keamanan Nasional adalah kemapuan suatu negara untuk melindungi dirinya dari ancaman ekternal. Kapabilitas militer merupakan sebuah fondasi kekuatan negara untuk menghadapi ancaman tersebut. Kapabilitas militer ini tergantung dari kualitas dan kuantitas dari angkatan bersenjata.

Keamanan Nasional merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan, pada dasarnya mengacu pada adanya perasaan"terbebas dari rasa takut dan ancaman" serta bagaimana sebuah negara mampu memenuhi kepentingan nasionalnya melalui berbagai macam cara. Keamanan sifatnya sangat relatif dan akan mudah berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan kondisi nyata (Kolodziej, 1992:31).

Dasar utama dari kemanan adalah kemampuan untuk mempertahankan kelangsungan hidup (survival) yag mencakup berbagai kondisi dari eksistensi suatu negara. Konsep kemanan itu sendiri dapat terdiri dari berbagai tipe unit analisis yang terbentang dari individu, kelompok masyarakat, negara dan sistem internasional. Menurut Buzan, keamanan sangat berkaitan dengan masalah kelangsungan hidup dimana terdapat isu-isu yang mampu menimbulkan ancaman serta harus mendapatkan perhatian ekstra untuk segera ditangani. Disamping itu dengan semakin meluasnya permasalahan keamanan maka pembahasan mengenai keamanan internasional ini dalam hubungan internasional sudah dilakukan sejak berakhirnya Perang Dingin yang sekaligus membuka era dalam pemahaman tentang keamanan. Dimana pengertian keamanan pasca Perang Dingin tidak lagi hanya bertumpu pada masalah konflik saja melainkan lebih kepada hal-hal yang

sifatnya lebih internal seperti lingkungan, hak-hak asasi manusia, demokratisasi dan permasalahan etnik lainnya.

Walter Lippman menyatakan

Sebuah negara yang aman dalam arti luas yaitu tidak adalam keadaan bahaya serta memiliki nilai-nilai penting untuk dikorbankan jika harapan dari pengorbanan tersebut mampu menghindarkan terjadinya perang dan itu memungkinkan, maka tertantang untuk mempertahankan kemenangan mereka seperti dalam peperangan.

Sedangkan Arnold Wolfers memaknakan konsep keamanan sebagai berikut Keamanan dalam pengertian yang objektif dapat diukur dari ketidakadaan ancaman dalam mendapatkan nilai-nilai dan dalam pengertian subjektif ketidakadaan akan ketakutan maka nilai-nilai tersebut akan diserang.

Beberapa definisi keamanan diatas memiliki persamaan dalam hal kebebasan terhadap ancaman-ancaman (militer) namun, definisi diatas memberikan *referent* atau aktor keamanan (individual, nasional, atau internasional). Dimana jika dilihat dari sudut pandang tradisional, konsep keamanan selama ini memang lebih pada ancaman yang bersifat militer dan lebih fokus pada aspek negara. Disamping permasalahan keamanan yang timbul akibat semakin meluasnya ancaman, kini juga terdapat isu-isu yang semakin mengemuka dan beragam meliputi konflik SARA, ketidakamanan ekonomi, degradasi lingkungan (termasuk kemungkinan digunakannya senjata pemusnah massal seperti senjata nuklir, biologi, dan kimia baik oleh aktor negara maupun non-negara).(Perwita dan Yani, 2005: 124).

### 2.5.1 Senjata Nuklir

Senjata nuklir adalah senjata yang mendapat tenaga dari reaksi nuklir dan mempunyai daya pemusnah yang dahsyat, serta dapat dilancarkan melalui berbagai cara, seperti melalui kapal terbang pengebom, peluru kendali, peluru kendali balistik, dan peluru kendali balistik jarak benua.

Senjata nuklir memiliki daya ledak yang berasal dari pemisahan (fisi) dan penyatuan (fusi) atom itu sendiri. Kemampuan fusi tersebut tidak dapat berdiri sendiri melainkan harus dikombinasikan denagn senjata nuklir yang berdasarkan atas pemisahan dalam meningkatkan panas untuk memulai proses penyatuan yang sangat kuat. Senjata yang berdasarkan atas fusi lebih kuat seribu kali dibandingkan senjata yang berdasarkan fisi, hal ini dapat mengakibatkan adanya kemungkinan kerusakan secara global dikarenakan adanya perang misil dengan nuklir didalamnya, disamping itu selain daya ledaknya yang besar senjata ini juga dapat mengakibatkan radiasi. (Charles,*Nuclear Weapons:Principles, Effect and Survivability*. London, 1994).

Definisi senjata nuklir menurut Greg Frey dalam *Regional control in the Pasific* : Alat yang mampu melepaskan enenrgi nuklir secara tidak terkontrol dan memiliki karakteristik digunakan untuk tujuan perang (Frey,1987:46-47).

Sedangkan dalam definisi yang lain *nuclear weapon* adalah :

"Bom, Misil, bahan peledak atau alat-alat perlengkapan militer lainnya (untuk memerangi uji coba senjata) dan menghasilkan ledakan yang berasal dari pelepasan atom karena pemisahan, penyatuan atau keduanya" (Goldblat, 1994:149

## 2.6 Teori Peranan

Teori peranan menegaskan bahwa perilaku politik adalah perilaku dalam menjalankan peranan politik. Teori ini berasumsi bahwa sebagian besar perilaku politik adalah akibat dari tuntutan atau harapan terhadap peranan yang kebetulan dipegang aktor politik. Seseorang yang menduduki posisi tertentu diharapkan atau diduga berperilaku tertentu pula. Harapan atau dugaan itulah yang membentuk peranan. Peranan memiliki dua arti. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya.

Peranan yang melekat dalam diri individu harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menempatkan individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Jadi seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Peranan mencakup tiga hal yaitu :

1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat sebagai organisasi.
2) Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3) Peranan juga dapat dikatakan sebagi perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. (Levinson dalam Soekanto, 1999:269).

Seseorang senantiasa berhubungan dengan pihak lain, biasanya setiap pihak mempunyai peranan tertentu (*set of roles*). Pembatasan perihal aneka macam peranan yang melekat pada individu-individu dalam masyarakat penting bagi hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya.
- Peranan tersebut seyogyanya dilekatkan pada individu-individu yang oleh masyarakat dianggap mampu melaksanakannya. Mereka harus terlebih dahulu terlatih dan mempunyai hasrat untuk melaksanakannya.
- Dalam masyarakat kadangkala dijumpai individu-individu yang tak mampu menjalankan perannya sebagaimana diharapkan oleh masyarakat. Kerena mungkin pelaksanaannya memerlukan pengorbanan arti kepentingan-kepentingan pribadi yang terlalu banyak.
- Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan perannya, belum tentu masyarakat akan dapat memberikan peluang-peluang yang seimbang. Bahkan seringkali terlihat betapa masyarakat terpaksa membatasi peluang-peluang tersebut.

Peranan negara yang terlibat dalam perundingan segi enam dalam masalah senjata nuklir Korea Utara dalam penggolongan sub sektor, sub ordiansi dalam kajian kawasan digolongkan ke dalam *intrusive system*.

*Intrusive system* dikemukakan oleh Louis J Cantori dan Steven L. Spiegel yang dikutip oleh T. May Rudy dalam buku *Studi Kawasan Sejarah Diplomasi*

*dan Perkembangan Politik di Asia*, antara lain: "*intrusive system* merupakan pola keterlibatan atau campur tangan negara luar kawasan ataupun sub kawasan".